

**PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK PADA
PELAKSANAAN SANKSI DENDA, PELAYANAN
FISKUS DAN KESADARAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di
Kota Semarang)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
memperoleh derajat S-2 Magister Akuntansi**



**Nama : Agus Nugroho Jatmiko
N I M : C4C002193**

**Kepada
Program Studi Magister Akuntansi
Program Pascasarjana
Universitas Diponegoro
Tahun 2006**

ABSTRACT

Although sum of tax payers increased year to year, there are many obstacle which can be a burden in order to enhance tax ratio, one of them are tax compliance. Unfortunately, researchs which have been done tend to scrutinize tax compliance of Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). This research study tax compliance rate of tax payer in city of Semarang by using several variables which have been used in some previous research such as attitude toward fine sanction, attitude toward service of fiscus and attitude toward tax awareness. These variables chose because fitter to personal tax payer rather than Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) payer. The aims of this study is to analyse the impact of attitude toward fine sanction, attitude toward service of fiscus and attitude toward tax awareness on tax compliance.

Population in this study are personal tax payers in city of Semarang. Based on data which obtained through KPP in Semarang, there were 29.006 effective personal tax payers in city of Semarang until year of 2003. To save time and cost, not all of those population became object in this study. Proportional sampling used to obtain sample. 100 sample was chose. Primary data collection method in this study is questionnaire. Multiple regression technique used to analyse data.

Results show that attitude toward fine sanction, attitude toward service of fiscus and attitude toward tax awareness have a positive and significant impact toward tax compliance.

Keywords : Tax compliance, attitude toward fine sanction, attitude toward service of fiscus and attitude toward tax awareness.

ABSTRAKSI

Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Namun kebanyakan penelitian yang telah dilakukan cenderung hanya meneliti kepatuhan wajib pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan saja (PBB). Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan WP OP di kota Semarang dengan menggunakan beberapa variabel bebas yang juga pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya seperti sikap WP terhadap sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan. Variabel ini dipilih karena cenderung lebih sesuai dengan WP OP dibandingkan variabel-variabel yang juga telah digunakan pada penelitian tentang WP PBB. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sikap WP terhadap sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan pada kepatuhan WP.

Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang ada di kota Semarang. Berdasarkan data dari KPP yang ada di kota Semarang, hingga akhir tahun 2003 tercatat sebanyak 29.006 WP OP yang merupakan WP OP efektif. Tidak semua WP OP efektif ini menjadi obyek dalam penelitian ini karena jumlahnya sangat besar dan guna efisiensi waktu dan biaya. Oleh sebab itu dilakukan pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *proportional sampling*. Jumlah sampel ditentukan 100 orang. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode angket (kuesioner). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP.

Kata kunci : Kepatuhan wajib pajak, sikap wajib pajak pada sanksi denda, sikap wajib pajak pada pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak pada kesadaran perpajakan.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	I
SERTIFIKASI	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
ABSTRACT	IV
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR	XI
DAFTAR LAMPIRAN	XII

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Telaah Pustaka.....	12
2.1.1. Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>).....	12
2.1.2. Teori Pembelajaran Sosial (<i>Social Learning Theory</i>).....	14
2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
2.1.4. Sikap Wajib Pajak.....	17
2.1.4.1. Sikap Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan Sanksi Denda.....	19
2.1.4.2. Sikap Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Fiskus.....	20
2.1.4.3. Sikap Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Perpajakan.....	22
2.2. Penelitian Terdahulu dan Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu.....	23
2.2.1. Penelitian Terdahulu.....	23
2.2.2. Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu.....	28
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis.....	29
2.4. Hipotesis.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data.....	33
3.2. Populasi dan Sampel.....	35
3.3. Definisi Operasional Variabel.....	37
3.4. Teknik Analisis.....	40
3.4.1. Asumsi Klasik.....	41
3.4.1.1. Uji Normalitas Data.....	42

3.4.1.2. Uji Heteroskedastisitas.....	42
3.4.1.3. Uji Multikolinieritas.....	43
3.4.2. Pengujian Hipotesis.....	44
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
4.1. Gambaran Umum Responden.....	45
4.2. Statistika Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian.....	47
4.3. Uji Reliabilitas dan Validitas.....	50
4.4. Analisis Data.....	51
4.4.1. Pengujian Asumsi Klasik.....	51
4.4.1.1. Uji Normalitas Data.....	52
4.4.1.2. Uji Heteroskedastisitas.....	53
4.4.1.3. Uji Multikolinieritas.....	54
4.4.2. Pengujian Hipotesis.....	56
4.4.2.1. Pembahasan Hipotesis 1.....	57
4.4.2.2. Pembahasan Hipotesis 2.....	60
4.4.2.3. Pembahasan Hipotesis 3.....	64
4.4.3. Pengujian Kelayakan Model.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	68
5.2. Saran.....	69

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1.1. Peran Sumber Penerimaan Pajak Dalam APBN.....	2
1.2. <i>Tax Ratio</i> Tahun 1999-2003.....	3
1.3. Perkembangan Wajib Pajak Dari Tahun 1991 Hingga 2002.....	4
1.4. Tingkat Kepatuhan WP OP di Kota Semarang Tahun 1999 Hingga 2003.....	5
2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	26
3.1. Perhitungan Pengambilan Sampel Untuk Setiap KPP.....	37
3.2. Definisi Operasional Variabel.....	39
4.1. Demografi Responden.....	46
4.2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	47
4.3. Ringkasan Hasil Perhitungan Reliabilitas dan Validitas.....	51
4.4. Hasil Uji Glejser.....	54
4.5. Hasil Uji Multikolinieritas.....	55
4.6. Hasil Analisis Regresi Berganda.....	57
4.7. Statistika Deskriptif Item-Item Pertanyaan Variabel Sanksi.....	59
4.8. Statistika Deskriptif Item-Item Pertanyaan Variabel Fiskus.....	62
4.9. Statistika Deskriptif Item-Item Pertanyaan Variabel Sadar.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1.	Kerangka Pemikiran Teoritis.....	30
4.1.	Histogram <i>Standardized Residual</i>	52
4.2.	PP Plot <i>Standized Residual</i>	53

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2. Data Untuk Uji Reliabilitas dan Validitas
- Lampiran 3. Output Reliabilitas dan Validitas
- Lampiran 4. Data Penelitian
- Lampiran 5. Data Yang Digunakan Untuk Analisis Regresi
- Lampiran 6. Output Statistika Deskriptif
- Lampiran 7. Output Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 8. Output Analisis Regresi Berganda

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri . Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (M. Said, 2003).

Penerimaan bukan pajak yaitu antara lain penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam (migas), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan negara dan lain-lain bersifat sangat tidak stabil dengan besarnya ketergantungan penerimaan-penerimaan tersebut terhadap faktor eksternal, oleh karena itu satu-satunya andalan pemerintah dewasa ini adalah penerimaan dari sektor perpajakan Kiryanto (2000).

Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan pada masa sekarang ini. Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara karena merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan. Dari data APBN 1981/82 sampai dengan tahun 2003, perkembangan peranan pajak dalam APBN sangat fenomenal. APBN yang sejak tahun 1981/82 lebih bertumpu pada penerimaan sektor migas dan bantuan proyek makin bergeser pada

penerimaan pajak di tahun anggaran tahun 1991/92 dan seterusnya hingga sampai dengan data tahun 2003 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut ini.

Tabel 1.1.

Peran Sumber Penerimaan Pajak Dalam APBN

Tahun	Peran Pajak dan Cukai	Peran Penerimaan Bukan Pajak	Peran Penerimaan Migas	Penerimaan Pembangunan	Total APBN (Trilyun)
1980/81	24,67%	2,69%	59,89%	12,74%	11.720,8
1981/82	23,33%	2,42%	61,97%	12,28%	13.921,6
1985/86	28,99%	6,53%	48,82%	15,65%	22.825,4
1986/87	34,92%	9,85%	28,95%	26,27%	21.892,8
1990/91	39,88%	4,28%	35,82%	20,03%	49.451,0
1991/92	46,27%	4,78%	28,92%	20,02%	51.993,9
1995/96	58,23%	10,02%	17,95%	13,50%	82.727,8
1996/97	58,26%	9,48%	20,73%	11,53%	95.840,2
2001	61,61%	1,59%	27,31%	9,49%	299.851,2
2002	70,38%	1,29%	21,05%	7,28%	304.182,4
2003	71,60%	4,73%	14,97%	8,70%	336.155,5

Sumber : Berita Pajak No. 1488/Tahun XXXV/1 April 2003.

Dari Tabel 1. di atas maka dapat dilihat bahwa trend yang terjadi pada tahun 1980an adalah bahwa titik berat penghasilan negara bukan di peranan pajak, namun lebih bertumpu pada penerimaan migas dan bantuan proyek yakni dana pinjaman dan hibah dari luar negeri. Fenomena ini terjadi karena pada tahun tersebut secara teknis lebih mudah memperbesar produksi sektor migas dan menerima bantuan luar negeri. Kondisi ini secara teoritis sangat rentan terhadap kelanjutan sumber-sumber penerimaan negara (M. Said, 2003). Kerentanan tersebut terjadi karena sektor migas merupakan sektor yang mengandalkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan makin lama cadangan migas akan

makin menipis, lebih lanjut sumber penerimaan dari bantuan luar negeri di masa mendatang harus dibayar kembali.

Pada tahun 1990 an hingga berdasarkan data tahun 2003, terlihat bahwa titik tumpu dari penerimaan negara bergeser kepada penerimaan pajak. Bahkan peranan pajak makin meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan beberapa tahun belakangan ini pemerintah sangat menitikberatkan peranan pajak dalam membiayai APBN, hal ini ditandai dengan makin meningkatnya target penerimaan pajak oleh Dirjen Pajak. Namun sayangnya terdapat kendala yang terjadi dalam memenuhi target penerimaan pajak oleh Dirjen Pajak (DJP) tersebut. Kendala tersebut adalah berupa *tax ratio* (merupakan jumlah pajak yang berhasil dipungut dibandingkan dengan Pendapatan Domestik Bruto) yang rendah.

Berdasarkan data yang ada *tax ratio* Indonesia baru mencapai 13,03% (sumber : Berita Pajak No. 1488/Tahun XXXV/1 April 2003). Nilai *tax ratio* ini masih dapat ditingkatkan, karena selama beberapa tahun terakhir ini jumlah wajib pajak senantiasa bertambah. Meskipun demikian tetap ada kendala dalam upaya meningkatkan *tax ratio*. Pada Tabel 1.2. dan Tabel 1.3. berikut ini dapat dilihat *tax ratio* dan perkembangan wajib pajak dari tahun 1991 hingga 2002.

Tabel. 1.2.

Tax Ratio Tahun 1999 – 2003

Tahun	<i>Tax Ratio</i> (Dalam Persen)
1999	12,29
2000	10.16
2001	11.72
2002	12.61
2003	13.03

Sumber : Berita Pajak No. 1488/Tahun XXXV/1 April 2003.

Tabel 1.3.**Perkembangan Wajib Pajak Dari Tahun 1991 Hingga 2002**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1991	1.250.526
1992	1.343.476
1993	1.447.185
1994	1.567.792
1995	1.692.426
1996	1.620.836
1997	1.941.860
1998	2.031.496
1999	2.154.643
2000	2.309.741
2001	2.711.250
2002	2.809.394

Sumber : Berita Pajak No. 1488/Tahun XXXV/1 April 2003.

Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Solich Jamin (2001) secara langsung menyatakan bahwa perlu peningkatan kepatuhan pajak guna meningkatkan *tax ratio*. Berdasarkan penelitian Solich Jamin (2001) juga diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan (WP Badan) dan wajib pajak orang pribadi (WP OP) ternyata lebih tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini dapat terjadi karena WP badan lebih cenderung menggunakan konsultan pajak bahkan mempekerjakan karyawan yang secara khusus mengurus masalah pajak perusahaan, berbeda dengan WP OP yang cenderung mengurus sendiri masalah pajaknya.

Di kota Semarang secara khusus, hingga tahun 2003 terdapat sebanyak 30.519 wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang terdaftar dan sebanyak 29.006

WP OP yang efektif. Namun 18.701 WP OP yang menyampaikan SPT, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP OP di kota Semarang hanya 64,47%. Berdasarkan data yang ada pula dapat dilihat bahwa ternyata tingkat kepatuhan WP OP di kota Semarang ternyata makin menurun dari tahun ke tahun. Pada Tabel 1.4. berikut ini dapat dilihat tingkat kepatuhan WP OP di kota Semarang dari tahun 1999 hingga 2003.

Tabel 1.4.

Tingkat Kepatuhan WP OP di Kota Semarang Tahun 1999 Hingga 2003

No.	SPT Tahun	WP Terdaftar	WP Efektif	WP Yang Menyampaikan SPT	% Kepatuhan
1.	1999	17.142	15.640	12.074	77,19%
2.	2000	19.112	17.600	12.513	71,09%
3.	2001	21.679	20.166	13.248	65,69%
4.	2002	24.774	23.261	15.210	65,38%
5.	2003	30.519	29.006	18.701	64,47%

Sumber : KPL. KPP.9.7.

Berdasarkan Tabel 1.4. di atas maka dapat dilihat bahwa dari tahun 1999 hingga tahun 2003, tingkat kepatuhan WP OP di kota Semarang senantiasa menurun. Hal ini tentu membutuhkan suatu kajian agar hal tersebut tidak terjadi berlarut-larut. Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian guna mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Semarang.

Beberapa penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh peneliti-peneliti. Solich Jamin (2001) meneliti mengenai perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak (gabungan WP Badan dan WP OP) yang ada di wilayah Jawa Tengah dan DIY pada masa sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Hasil

penelitian Solich Jamin adalah bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak yang signifikan antara periode sebelum krisis ekonomi dan periode sesudah krisis ekonomi. B.M. Sitorus (2003) juga melakukan penelitian yang relatif serupa dengan penelitian Solich Jamin, hanya saja B.M. Sitorus (2003) secara khusus melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak badan pada masa sebelum dan sesudah krisis ekonomi pada WP badan pada KPP Jakarta Mampang Prapatan. Penelitian B.M. Sitorus dilakukan dengan melakukan uji beda pada kedua periode tersebut. Hasil penelitiannya adalah bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada masa sebelum dan sesudah krisis ekonomi.

Kiryanto (2000) secara khusus melakukan penelitian terhadap tingkat kepatuhan WP Badan di DIY. Penelitian Kiryanto (2000) dilakukan dengan menggunakan variabel bebas lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian. Hasil penelitian Kiryanto (2000) adalah bahwa lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Suhardito (1996) berupaya untuk memperoleh bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB di kota Surabaya. Hasil penelitian Bambang Suhardito (1996) adalah bahwa faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak seperti kesadaran bernegara, pemahaman WP tentang UU, persepsi penghindaran pajak, persepsi tentang beban PBB dan status rumah WP tidak berpengaruh signifikan. Fratnesi (2001) juga melakukan penelitian yang relatif sama dengan Bambang Suhardito

(1996) dengan obyek penelitian di kota Bengkulu. Terdapat beberapa faktor yang tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB yaitu lama tinggal WP, pendapat WP tentang beban PBB dan rasio *permanent difference*.

Sulud Kahono (2003) melakukan penelitian dengan kepatuhan wajib pajak PBB sebagai variabel terikat. Variabel bebas yang digunakannya adalah sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap penghindaran PBB. Hasil penelitian Sulud Kahono (2003) tersebut adalah variabel bebas yang digunakan baik secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP PBB.

Hampir sama dengan penelitian Sulud Kahono (2003), Suyatmin (2004) juga menggunakan beberapa variabel yang sama yaitu sikap WP terhadap pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, dan sikap WP terhadap pelayanan fiskus. Suyatmin (2004) menggunakan pula variabel sikap WP terhadap kesadaran bernegara dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan sebagai variabel bebas. Hasil penelitian Suyatmin (2004) juga menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP PBB.

Dari uraian mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian yang telah ada cenderung melakukan uji beda kepatuhan WP sebelum dan sesudah krisis ekonomi (misalnya penelitian Solich Jamin, 2001 dan B.M. Sitorus), secara khusus mengkaji kepatuhan WP Badan (misalnya penelitian Kiryanto, 2000) dan mengkaji WP PBB

(misalnya penelitian Bambang Suhardito, 1996; Fratnesi, 2001; Sulud Kahono, 2003; Suyatmin, 2004). Belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP), padahal data yang ada (Tabel 1.4.) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP OP terutama di kota Semarang cenderung menurun tahun demi tahun.

Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan WP OP di kota Semarang. Penelitian ini dilakukan di Semarang karena berdasarkan data dari KPP di kota Semarang (KPL.KPP.9.7.) diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak menurun dari tahun ke tahun. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa variabel bebas yang juga pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya seperti sikap WP terhadap sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan. Variabel ini dipilih karena cenderung lebih sesuai dengan WP OP dibandingkan variabel-variabel yang juga telah digunakan pada penelitian tentang WP PBB. Sebagai contoh sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah dipandang kurang relevan untuk digunakan dalam penelitian WP OP karena pajak (bukan PBB) dari WP OP maupun WP Badan dikelola langsung oleh pemerintah pusat bukan pemerintah daerah sebagaimana PBB. Variabel sikap WP terhadap kesadaran bernegara lebih bersifat umum, dan secara khusus hal tersebut dapat dicerminkan oleh kesadaran wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan.

1.2. Perumusan Masalah

Masalah yang terjadi pada saat ini adalah bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) di kota Semarang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP OP di kota Semarang sangat diperlukan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan masalah “faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan WP OP di kota Semarang?”.

Sementara itu beberapa penelitian yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung mengkaji WP Badan maupun WP PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Hal ini tentu menimbulkan kesenjangan penelitian yang membutuhkan penelitian yang secara khusus mengkaji WP OP.

Variabel-variabel yang diperkirakan mempengaruhi tingkat kepatuhan WP OP adalah sikap WP terhadap sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan. Variabel ini dipilih karena cenderung lebih sesuai dengan WP OP dibandingkan variabel-variabel yang juga telah digunakan pada penelitian tentang WP PBB (Sulud Kahono, 2003 dan Suyatmin, 2004).

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah sikap wajib pajak pada sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sikap wajib pajak pada pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

3. Apakah sikap wajib pajak pada kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh dari sikap wajib pajak pada sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh dari sikap wajib pajak pada pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk menganalisis pengaruh dari sikap wajib pajak pada kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Dirjen Pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP).
2. Bagi KPP secara umum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil KPP guna meningkatkan kepatuhan WP OP yang dilayaninya.
3. Bagi pihak akademisi dan peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris

dan memberikan sumbangan dalam pengembangan teori perpajakan dan akuntansi keperilakuan.